



# RENCANA KERJA 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSP adalah salah satu proses dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Renja DPMPTSP memuat program, kegiatan, alokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja DPMPTSP mengacu pada hasil evaluasi Renja DPMPTSP tahun lalu dan hasil evaluasi Renja DPMPTSP tahun berjalan.

Penyusunan Renja DPMPTSP mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Renstra DPMPTSP Tahun 2023-2026 yang telah disusun.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta ini, baik secara substansi perencanaan pembangunan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja serta penyelarasan dengan Sasaran dan Prioritas Nasional, dan identifikasi Program dan Kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam berkolaborasi guna membangun kota Jakarta yang kita cintai bersama ini.

Jakarta, 21 Juli 2023  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta



Benni Aguscandra  
NIP 196908081997031004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Adapun Indikator dan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026 dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan pertama** Meningkatkan Kualitas Iklim Penanaman Modal Untuk Mendukung Pembangunan Kota dengan indikator realisasi nilai investasi. Pada akhir periode Renstra ditargetkan sebesar 493 triliun dan estimasi pada tahun 2023 tercapai 128,4 dan tahun 2024 ditargetkan sebesar 124 triliun.

Tujuan pertama tersebut diturunkan menjadi sasaran yakni Perbaikan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing dengan indikator *Score Of Business Enabling Environment*. Pada akhir periode Renstra ditargetkan tercapai sebesar 80.01 dengan proyeksi tahun 2023 sebesar 71,69 dan target 2024 sebesar 73,84.

2. **Tujuan kedua** Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Terpadu. Pada akhir periode Renstra ditargetkan sebesar 91 dan pada tahun 2023 serta 2024 diproyeksikan sebesar 91. Tujuan kedua tersebut diturunkan menjadi sasaran yakni Pengembangan Layanan Berbasis Digital Dan Aksesibilitas Perizinan dengan indikator Persentase Izin Yang Diterbitkan Secara Online. Untuk akhir periode Renstra, proyeksi 2023 dan target 2024 ditetapkan sebesar 100 %

Program dan indikator kinerja dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator program Nilai Kemudahan Investasi
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator program Persentase Promosi Proyek-Proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta dan Persentase Penguatan Kegiatan Promosi Penanaman Modal DKI Jakarta
3. Program Pengendalian Penanaman Modal dengan indikator program Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
4. Program Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator program Persentase penerbitan izin tepat waktu
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator program Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator program Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mengacu Rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2024 dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 mendukung tercapainya Misi ke-2, yaitu "Perekonomian Inklusif Yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak Dan Pemerataan Kesejahteraan" dan Misi ke 4, yaitu Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu dan memedomani klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta hasil pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang terdiri atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilengkapi dengan kinerja, indikator kinerja serta satuan.

Dengan harapan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi di DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam percepatan pencapaian Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPD 2023-2026.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	i-3
Daftar Isi	i-5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
<b>BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	<b>II-1</b>
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-2
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-16
2.4 <i>Review</i> terhadap RKPD	II-23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-49
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>III-1</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-2
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-2
3.3. Program dan Kegiatan	III-4
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Rencana Kerja, Target, dan Pendanaan	IV-2
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>V-1</b>

# PENDAHULUAN

---

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,  
Sistematika Penulisan



## 1.1. Latar Belakang

RPD Tahun 2023-2026 yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 sedangkan Renstra PD Tahun 2023-2026 yang disusun menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran serta prakiraan maju. Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada RKPD untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang didalamnya memuat perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Renstra PD 2023-2026 dan RKPD 2024.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Rancangan RKPD- Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD-Tahun 2024. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2024 dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Normenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2023;
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 104);
35. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
36. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
37. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
38. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);
39. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
40. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;

41. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
42. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;
43. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
44. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
45. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
46. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
47. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
48. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
49. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
50. Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
51. Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Tipe III dan Tipe IV Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
52. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Input dan Suervisi Rencana Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

**BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU**

Bab ini menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hasil pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2023.

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Program dan Kegiatan.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini berisi tentang garis besar rencana program dan prioritas Perangkat Daerah dalam Renja Tahun 2024.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini dijelaskan kesimpulan dari penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 yang berisi uraian catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

# EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU



---

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi, Review RKPD, Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017-2022 yang terdapat 2 indikator kinerja utama . Adapun realisasi indikator utama yang diampu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun 2022 disajikan dalam table berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Realisasi investasi	124,5 Triliun	143 Triliun	114.8%	Sangat Baik
2	Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	91,5 Indeks	93,2 Indeks	101.85%	Sangat Baik

### 2.1.1. Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta

Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja jumlah realisasi investasi pada tahun 2022 yakni sebesar Rp. 143 Triliun dari target sebesar 124,5 Triliun atau tercapai sebesar 114,8% dan masuk dalam kategori berhasil. Hal ini disebabkan membaiknya iklim penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta sehingga memberikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Jakarta. Perbaikan infrastruktur dan banyaknya program pemerintah di bidang pembangunan juga turut meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan target tahunan maka capaian indikator ini telah tercapai 100%.

**Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja organisasi adalah :**

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Penanaman Modal dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang antara lain digunakan untuk harmonisasi peraturan, pelaksanaan promosi dan pengendalian penanaman modal.
- Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non izin secara online,
- Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan,
- Dikembangkannya Jakarta Investment Center (JIC) untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan segala informasi tentang investasi di Jakarta.
- Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh para investor di DKI Jakarta.

- Ditingkatkannya UMKM dengan melakukan kemudahan melalui relaksasi pemberian IUMK.
- Dikembangkannya pengintegrasian Sistem JakEvo-AJIB untuk mengatasi perizinan yang tidak dapat dilakukan secara online 100% karena beberapa hal yang harus tetap dijalani secara manual.

**Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah :**

- Adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir.
- Harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang belum tercapai.
- Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya menerima informasi perubahan kebijakan yang telah dilakukan Pemda DKI Jakarta terkait ease of doing business (EODB).
- Masih terbatasnya informasi proyek-proyek investasi yang akan dipromosikan.

**Tindak lanjut tantangan :**

- Melakukan pengkajian dan penelaahan atas adanya kebijakan yang baru agar dapat diimplementasikan.
- Menyederhanakan regulasi investasi dan atau penanaman modal serta melakukan sosialisasi regulasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
- Meningkatkan aktivitas promosi melalui Branding (awareness campaign, penguatan citra investasi DKI) dan Bussines Forum.
- Mengoptimalkan fungsi JIC dalam rangka memperoleh informasi terkait proyek-proyek investasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
- Harmonisasi regulasi Pusat dan Daerah.
- Penyusunan kebijakan dan disinsentif.
- Pengembangan kebijakan iklim penanaman modal sebagai agenda pemulihan ekonomi.
- Optimalisasi pengawasan dan fasilitasi penanaman modal.
- Self Awareness terhadap kebijakan EODB.
- Optimalisasi promosi investasi mewujudkan Jakarta sebagai destinasi investasi.
- Fasilitasi KPBU sebagai salah satu agenda *Creative Financing*

**2.1.2 Indeks Tingkat kepuasan masyarakat**

Indeks tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta karena merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja, dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Indeks tingkat kepuasan masyarakat diukur dengan cara melakukan Survey Kepuasan Masyarakat. Survey

Kepuasan Masyarakat dilakukan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta pada pusat-pusat layanan baik dari tingkat Dinas, Kep. Seribu, Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan. Total unit layanan yang dievaluasi adalah sebanyak 310 layanan, yang terdiri dari 1 Dinas, 5 unit kota/ 1 Kab, 42 layanan kecamatan dan 261 unit kelurahan. Survey dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian wawancara langsung dengan masyarakat yang telah mendapatkan layanan secara paripurna dengan menggunakan kuesioner terstruktur (*Structured Questionnaire*).

Untuk perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 dan sekarang di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017, dimana terdapat 9 pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat, dengan unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan meliputi:

1. Kemudahan Persyaratan Pelayanan,
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan,
3. Ketepatan Waktu Penyelesaian,
4. Kesesuaian Biaya,
5. Kesesuaian Peraturan (Hasil Pelayanan dengan Ketentuan yang ditetapkan),
6. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan,
7. Sikap yang mencerminkan perilaku Ber – AKHLAK
8. Kualitas sarana dan prasarana dan
9. Kecukupan / keefektifan sarana informasi/pengaduan

Berdasarkan jawaban yang diterima dari responden tersebut kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan Tabel Nilai persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, sehingga bisa diketahui Mutu Pelayanan dan Kinerjanya.

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2022 sebesar 93,2 dari target sebesar 91,5 atau tercapai sebesar 101,8% dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan sebesar 3,4% yakni dari 90,09 pada tahun 2021 menjadi 93,2 pada tahun 2022. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 105%.

**Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja organisasi adalah :**

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- Biro ORB dan Kominfo memberikan dukungan penuh kepada DPMPTSP terkait pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- Sarana Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sudah baik seperti kuesioner SKM sudah diintegrasikan dengan Sistem Jakevo, sehingga kuesioner secara otomatis muncul sebelum responden mendownload output perizinan/non perizinan.
- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia DPMPTSP untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- Tersedianya sarana prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
- DPMPTSP berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui harmonisasi peraturan dan penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui portal pelayanan.jakarta.go.id
- Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik sebagai one-stop service 328 perizinan dan pelayanan terpadu kerjasama pelayanan pemerintah pusat dan daerah.
- Tersedianya pelayanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu layanan antar jemput berkas izin bagi pemohon yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung mengurus izin ke loket, semua jenis perizinan dan non perizinan dapat dilakukan melalui AJIB dengan syarat pemohon harus sebagai pimpinan/karyawan perusahaan tersebut dan bukan pihak ketiga atau calo, selain itu dikembangkan pelayanan AJIB dengan Mobile Service Unit (MSU) sebanyak 3 unit yang dapat juga melayani perizinan dan non perizinan di lokasi tertentu. Jumlah jasa pengurusan melalui AJIB pada tahun 2022 secara keseluruhan 887.170 layanan.
- Tersedianya layanan Call Center DPMPTSP yang dapat diakses melalui sambungan telepon 021-1500164 untuk melayani informasi pengurusan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan masyarakat dan pemesanan layanan AJIB.
- Terobosan serta inovasi untuk kemudahan layanan perizinan dan non perizinan, antara lain :
  - a. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan mendukung Ketetapan Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) maka telah dilakukan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atas permohonan perizinan dan/atau non perizinan dengan melakukan pengecekan pada basis data yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) melalui integrasi data dengan

- sistem yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilakukan secara elektronik perlu dilakukan pemantauan terhadap seluruh aspek yang berpotensi menjadi hambatan dalam teknis pelaksanaan untuk kemudian segera ditindaklanjuti.
  - c. Bahwa untuk mendorong kemudahan dalam berinvestasi, pemberdayaan dan perlindungan ekonomi warga masyarakat, serta menindaklanjuti program Percepatan dan Relaksasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Mendorong Aktivitas Perekonomian pada Masa Pandemi Covid-19 perlu dilakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan perizinan. Sejalan dengan perubahan paradigma perizinan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai solusi atas banyaknya jumlah bangunan rumah tinggal eksisting tidak memiliki izin, permohonan perizinan yang tertunda cukup lama penyelesaiannya, kesulitan warga untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti proses perizinan terutama terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Maka dari itu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 7 dimana penyelenggara PTSP wajib menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan, telah dikembangkan inovasi melalui aplikasi Jakevo yang menggunakan pendekatan baru dimana pemohon akan difasilitasi, didampingi, dan diberikan bantuan oleh petugas dari DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sejak tahap pra-permohonan. Sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut maka ditetapkanlah Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Eksisting Relaksasi.
  - d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penetapan Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

- e. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pada penyelenggaraan pelayanan perizinan di Bidang Pekerjaan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standarisasi Perhitungan Nota Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (NPR IMB).
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 166 Tahun 2020 telah ditetapkan Izin Penyelenggaraan Tempat Uji Emisi, dalam rangka kemudahan dan percepatan pelayanan maka ketentuan sebagaimana pada keputusan tersebut perlu disempurnakan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Tempat Uji Emisi
- g. Penyelenggaraan Pelayanan Gambar Pra Perancangan Arsitektur yang menjadi kewenangan tingkat Dinas dan Kota/Kabupaten Administrasi dilakukan secara online. Dalam hal ini telah terintegrasi dengan pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mana telah ditetapkan dengan peraturan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian diperlukan penyederhanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi pada DPMPTSP dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1285 Tahun 2019 tentang Tim Evaluasi Perizinan Pemanfaatan Ruang, maka dikeluarkanlah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gambar Pra Perancangan Arsitektur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov DKI Jakarta Percepatan penyampaian laporan output perizinan bidang kesehatan berbasis elektronik (Silabik) di UP PTSP Kecamatan Taman Sari. Sistem pelaporan kesehatan berbasis elektronik mempercepat Dinas Teknis terkait (Suku Dinas Kesehatan) untuk mendapatkan data perizinan bidang kesehatan yang diterbitkan oleh DPMPTSP sehingga memudahkan untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengawasan Pengendalian (BINWASDAL)
- h. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada UP PMPTSP sebagai dukungan percepatan pencapaian kemudahan berusaha bagi masyarakat. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2021 ditetapkan standarisasi sarana dan prasarana pelayanan serta sumber daya manusia pada service point pelayanan terpadu satu pintu sebagai implementasi sistem manajemen mutu dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat selama pandemi COVID-19

- i. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya serta telah berjalannya mekanisme pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko, maka ditetapkanlah Instruksi Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Layanan Perizinan Dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasca Implementasi Sistem OSS Berbasis Risiko
- j. Dalam rangka mendorong aktivitas perekonomian dan pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta akibat wabah Covid-19 maka dilakukan Percepatan dan Relaksasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan sikap responsif, proaktif dengan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan.
- k. Penyelenggaraan Pelayanan Izin Penggunaan Tanah Makam secara elektronik melalui web [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id) dalam rangka efektivitas pelayanan Izin Penggunaan Tanah Makam.
- l. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan keserasian pola ruang area perencanaan dengan rencana kota disekitarnya pada perumahan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2021 tentang Pelayanan Konsultasi Rencana Pola Perpetakan pada Perumahan yakni kegiatan hunian berupa rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah flat.
- m. Percepatan pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah dilaksanakan dengan menyederhanakan prosedur dan persyaratan.
- n. Dalam rangka mendorong aktivitas perekonomian pada masa pandemi Covid-19 maka dilakukan Pelaksanaan Relaksasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
- o. Dalam rangka mendukung ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk menanggulangi dampak status tanggap darurat bencana wabah Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta maka dilakukan Perpanjangan Masa Berlaku Dokumen Izin Tertentu di Bidang Kesehatan terkait penyebaran Covid-19.
- p. Pembuatan kanal Sistem Informasi Kotak Aspirasi (SIKOPI) pada web [internalpelayanan.jakarta.go.id](http://internalpelayanan.jakarta.go.id) sebagai sarana komunikasi pengumpulan fakta-fakta lapangan yang diharapkan dapat mendekatkan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan implementasi pelaksanaan layanan tersebut di lapangan. Selain itu, melalui hal tersebut diharapkan juga agar ditemukannya permasalahan-pemmasalahan baru yang tersembunyi dari perspektif manajemen atau pejabat yang berwenang, sehingga dapat menghasilkan capaian yang

maksimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat berdasarkan *evidence based*.

**Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah :**

- Adanya pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
- Adanya perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu penyesuaian.
- Masih adanya anggapan bahwa layanan perizinan dan non perizinan sulit dan rumit.
- Masih terdapat rekomendasi dari SKPD teknis terhadap perizinan dan non perizinan yang melebihi batas waktu
- Kebutuhan SDM Teknis masih ada kekurangan.

**Tindak lanjut tantangan :**

- Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP terkait diagendakan secara terjadwal serta melibatkan stakeholder terkait.
- Pembuatan program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat pengurusan izin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungli.
- Perlu dikembangkan aplikasi pemberian rekomendasi secara online (e-rekomtek)
- Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan
						Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
1	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai kemudahan investasi	80,1	Nilai	100 % Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	100%	72,5	72,5	91%	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase jumlah rancangan peraturan dan kebijakan penanaman modal yang disusun tepat waktu		%	1 Kebijakan Kebijakan penanaman modal yang disusun	1 Kebijakan	100%	100	100		
	2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Dokumen	5 Jenis Jumlah regulasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang disusun	5 Jenis	100%	4	4		

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan
						Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	100	%	80	85,77	107,20%	100	100	100%	
			Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	100	%				100	100	100%	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan		Proyek	1 Laporan Laporan Efektifitas Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	1 Laporan	100%	16	16		
	2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi		Dokumen	4 Laporan Laporan penyelenggaraan Jakarta Investment Center 4 Laporan Laporan pelaksanaan promosi penanaman modal	4 Laporan  4 Laporan	100%  100%	4	4		
3	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	90	%	100% Persentase permasalahan yang dihadapi perusahaan debottlenecking	100%	100%	60	60	67%	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal		Perusahaan	2000 Perusahaan Jumlah perusahaan yang termasuk dalam daftar pengendalian	3954 Perusahaan	297,70%	12.000	12.000		

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan
						Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		<b>Kewenangan Daerah Provinsi</b>				<b>pelaksanaan penanaman modal</b>						
	2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Kegiatan Usaha	4 Laporan Laporan pelaksanaan pengendalian penanaman modal dan Laporan Fasilitas Pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan	100%	16	16		
	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal		Pelaku Usaha	384 Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	700	182,29%	422	422		
	2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		Kegiatan Usaha	18 Kegiatan Usaha Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	46 Kegiatan Usaha	255,56%	23	23		
4	2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase penerbitan izin tepat waktu</b>	100	%	<b>84 Indeks Produktivitas Pelayanan DPMPSTP</b>	<b>103,5</b>	<b>123,21%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Laporan	100% Persentasanya Penanaman Modal yang Menurut	100%	100%	2	2		

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan
						Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		<b>Kewenangan Daerah Provinsi</b>				<b>Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>						
	2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi		Pelaku Usaha	4 Laporan Laporan Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan 4 Laporan Jumlah laporan pelayanan izin Bidang Ketataruangan	4 Laporan  4 Laporan	100%  100%	11.366	11.366		
	2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi		Orang	4 Laporan Laporan pengelolaan call center 9 Rasio Berita Positif Terhadap Pelayanan DPMPSTP 100% Persentase Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	4 Laporan  9.5  100%	100%  105,6%  100%	73.536	73.536		
5	2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi</b>	100	<b>Indeks</b>	<b>84 Indeks Produktivitas</b>	<b>93</b>	<b>110,71%</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87%</b>	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2023	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Keterangan
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022	Capaian (%)		Realisasi Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan		<b>Sistem Data dan Informasi</b>						
6	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sistem yang Dikembangkan	Sistem	1 Laporan Laporan Pengelolaan Sarana dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi Untuk Peningkatan Pelayanan Publik	1 Laporan	100%	3	3		
	2.18.06.1.01.01	<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	<i>Dokumen</i>	<i>4 Sistem Jumlah Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik yang dikembangkan 100% Persentase sarana dan prasarana TI untuk peningkatan pelayanan publik dikelola dengan baik</i>	<i>4 Sistem</i>	<i>100%</i>	<i>4</i>	<i>4</i>		

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator kinerja Pelayanan perangkat daerah sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 -2026 yakni: Realisasi Nilai Investasi; serta Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan,

### 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

NO	INDIKATOR	STANDAR PELAYANAN MINIMUM/ STANDAR NASIONAL	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	-	-	Realisasi Nilai Investasi	124,5	128,4	120	126	143	*36,5	120	126	-
2	-	-	Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu	90,09	91	91	91	93.2	*93,75	91	91	-

\* Berdasarkan Realisasi pada TWI Tahun 2023

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

### 2.3.1 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan Provinsi DKI Jakarta, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

#### Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan serta Tindak Lanjut

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perubahan Kebijakan dari pemerintah pusat (antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja) memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak segera dapat direalisasikan oleh daerah;</li> <li>➤ Penambahan Tugas Pokok dan Fungsi terutama terkait fungsi pengawasan memerlukan pengkajian dan penyusunan kebijakan baru terutama dalam standar operasional pelaksanaan kewenangan pengawasan perijinan</li> <li>➤ Mempertahankan target indeks kepuasan masyarakat dan masih terdapat ketimpangan nilai kualitas layanan diantara UPPMPTSP Kelurahan Kecamatan maupun Kota ;</li> <li>➤ Masih rendahnya tingkat Inovasi dalam pelaksanaan pelayanan</li> <li>➤ Terdapat Unit layanan yang belum melakukan layanan sesuai standar yang ditetapkan</li> <li>➤ Terdapat Risiko Gratifikasi dan/atau penyuapan dalam proses bisnis dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Respon daerah terhadap kebijakan pusat harus disikapi melalui pengkajian dan telaah mendalam untuk disesuaikan sehingga dapat diimplementasikan daerah dalam bentuk kebijakan atau aturan yang baru atau pendukung lainnya;</li> <li>➤ Penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pengawasan perijinan sehingga dapat terstandarisasi pada tingkat Dinas, UPPMPTSP Kota, UPPMPTSP Kecamatan dan UPPMPTSP Kelurahan</li> <li>➤ Identifikasi kelebihan dan kekurangan melalui survey kepuasan publik yang biasanya dilakukan berkala, kemudian dibuat program atau kegiatan untuk meningkatkan hal yang sudah dianggap baik dan memperbaiki yang masih kurang baik;</li> <li>➤ Mendorong seluruh Unit PMPTSP untuk melakukan inovasi pelayanan melalui pemberian apresiasi terhadap unit yang melakukan inovasi</li> <li>➤ Pelaksanaan Monitoring layanan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan layanan di seluruh unit layanan</li> <li>➤ Menanamkan nilai-nilai atau budaya anti penyuapan melalui Sertifikasi ISO</li> </ul>

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

	<p>pencapaian kinerja mengingat masih adanya interaksi langsung dengan pihak yang membutuhkan pelayanan (pemohon/stakeholder lainnya)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan Kualitas mal pelayanan publik</li> </ul>	<p>37001:1 dan pelaksanaan pengendalian pelayanan melalui misteri shooper</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan peningkatan kualitas Mal Pelayanan Publik</li> </ul>
<p><b>Penanaman modal dan Jakarta Investment Centre</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Iklim investasi global yang mempengaruhi banyaknya investor dalam menginvestasikan dananya di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>➤ Meningkatnya keunggulan komparatif (daya saing) investasi daerah pesaing sehingga daerah pesaing menjadi lebih menarik untuk berinvestasi;</li> <li>➤ Promosi investasi daerah belum optimal sehingga Jakarta belum menjadi Brand Tujuan Investasi Nasional;</li> <li>➤ Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta turunannya;</li> <li>➤ Perubahan Regulasi investasi dan atau penanaman modal dikhawatirkan akan memberikan persepsi ketidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan investor dan menarik investor untuk investasi di Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>➤ Meningkatkan promosi dalam upaya menarik investor untuk berinvestasi di Provinsi DKI Jakarta</li> <li>➤ Kajian parsial dan komprehensif terhadap trend atau kecenderungan investasi global, nasional, dan regional;</li> <li>➤ Memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha bagi calon investor</li> <li>➤ Aktivitas promosi perlu ditingkatkan melalui Branding (awareness campaign, penguatan citra investasi DKI); Iklan Media (media berbayar, milik sendiri, media sosial); Selling atau Jemput Bola;</li> <li>➤ Jakarta Investment Center perlu didorong lebih aktif dan proaktif menjadi bagian dari promosi Jakarta untuk menciptakan Brand Jakarta sebagai Tujuan Investasi Nasional;</li> <li>➤ Dibuat forum bersama atau komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten;</li> <li>➤ Perlu dikaji dan ditelaah setiap regulasi baru yang muncul agar dapat diimplementasikan daerah;</li> <li>➤ Disederhanakannya regulasi investasi dan atau penanaman modal;</li> <li>➤ Sosialisasi regulasi harus mempunyai agenda terjadwal yang diinisiasi pemerintah daerah dengan pemerintah</li> </ul>

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

	<p>pastian dalam berusaha (iklim investasi);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peningkatan kapasitas SDM DPMPTSP baik tingkat kelurahan, Kecamatan kota dan Dinas dalam kompetensi dan pemahaman terkait investasi baik regulasi, potensi daerah dan cara mempromosikan potensi daerah;</li> <li>➢ Masih adanya investor yang terlambat atau belum membuat LKPM;</li> <li>➢ Jakarta Investment Center belum berjalan secara optimal</li> <li>➢ Terdapat Risiko Gratifikasi dan/atau penyuapan dalam proses bisnis dalam pencapaian kinerja mengingat masih adanya interaksi langsung dengan pihak yang membutuhkan pelayanan (pemohon/ stakeholder lainnya)</li> </ul>	<p>pusat dengan narasumber kompeten;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Panduan standarisasi kompetensi SDM terkait investasi dan atau penanaman modal;</li> <li>➢ Pelatihan pendukung guna meningkatkan kompetensi yang diagendakan terjadwal;</li> <li>➢ Diklat, sosialisasi, seminar, <i>Coffee Morning</i> serta pelaksanaan <i>JIC Talks</i> yang membahas informasi terbaru tentang investasi baik regulasi, trend, dan hal terkait lainnya;</li> <li>➢ Perlu ada sosialisasi akan pentingnya LKPM bagi investor;</li> <li>➢ Perlu dibuat aturan yang mengatur pelaporan LKPM;</li> <li>➢ Perlu ditetapkan sistem reward dan punishment untuk pelaporan LKPM oleh investor;</li> <li>➢ Peningkatan peran dan fungsi Unit Kota dan Kecamatan dalam fungsi pengendalian Penanaman Modal</li> <li>➢ Mengoptimalkan Jakarta Investment Center sebagai pusat kegiatan dalam melakukan investasi dan penanaman modal</li> <li>➢ Pelibatan dan koordinasi dengan semua instansi terkait untuk menjaga iklim investasi yang kondusif serta aktivitas program kerja bersama;</li> <li>➢ Menanamkan nilai-nilai atau budaya anti penyuapan melalui Sertifikasi ISO 37001:1</li> </ul>
<p><b>Pengaduan dan Penyuluhan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Potensi resiko meningkatnya jumlah tuntutan dari pemilik ijin sebagai akibat adanya pelanggaran ketentuan (misal: tuntutan dicabutnya ijin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Dibuatnya aturan yang jelas termasuk sistem reward dan punishment terkait kepatuhan ijin usaha;</li> </ul>

	<p>karena pelanggaran dibidang pariwisata/spa/panti pijat/hiburan malam dan sebagainya);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Potensi resiko meningkatnya jumlah tuntutan karena pencabutan ijin sebagai akibat adanya perubahan kebijakan tata ruang;</li> <li>➢ Belum tersedianya SDM sesuai bidang kerja pengaduan dan komunikasi masyarakat;</li> <li>➢ Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP;</li> <li>➢ Peningkatan kualitas dari Kontain media sosial milik DPMPTSP;</li> <li>➢ Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa ijin sulit dan adanya konten negatif lain terkait DPMPTSP;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Dibuat panduan tahapan pencabutan ijin usaha akibat adanya pelanggaran ketentuan;</li> <li>➢ Sosialisasi berkala terhadap aturan dan tahapan pencabutan ijin usaha terhadap pemilik ijin usaha agar mematuhi ketentuan dan kesepakatan atas pemberian ijin usaha;</li> <li>➢ Dibuatnya aturan yang mengatur kewenangan terkait pengalihan dan atau kemungkinan pencabutan ijin usaha atau pemindahan ijin usaha sebagai akibat perubahan kebijakan tata ruang;</li> <li>➢ Sosialisasi RTRW dan aturan terhadap adanya kewenangan pemerintah provinsi untuk mengalihkan dan atau kemungkinan mencabut ijin usaha karena perubahan kebijakan tata ruang;</li> <li>➢ Identifikasi kebutuhan SDM (jurusan komunikasi dan hukum) lalu menyusun panduan kompetensi teknis serta melakukan perekrutan terkait kebutuhan bidang pengaduan dan masyarakat;</li> <li>➢ Pelatihan pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan;</li> <li>➢ Sosialisasi peraturan, kebijakan, dan SOP terkait harus mempunyai agenda terjadwal dan bersifat segera serta diinisiasi pemerintah daerah melalui DPMPTSP;</li> <li>➢ Terus melakukan update informasi, berita, prestasi atau penghargaan, inovasi, peraturan dan hal terkait lainnya dengan media sosial baik lewat website, twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya;</li> <li>➢ Dibuat program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat pengurusan ijin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada</li> </ul>
--	--	---

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat Risiko Gratifikasi dan/atau penyyuapan dalam proses bisnis dalam pencapaian kinerja mengingat masih adanya interaksi langsung dengan pihak yang membutuhkan pelayanan (pemohon/ stakeholder lainnya)</li> </ul>	<p>pungutan, dan hal positif lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menanamkan nilai-nilai atau budaya anti penyyuapan melalui Sertifikasi ISO 37001:1</li> </ul>
<b>Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Langkah atau upaya tindak lanjut setelah seluruh layanan bersifat online;</li> <li>➤ Perubahan kebijakan baik terkait aktivitas investasi, tata ruang, dan kebijakan lain;</li> <li>➤ Perubahan Tusi dalam hal kewenangan teknis dan pelaksanaan kewenangan koordinasi pengawasan perijinan yang berdampak pada SDM;</li> <li>➤ Belum dijabarkan secara lebih lanjut mengenai ruang lingkup pelaksanaan koordinator pengawasan perijinan;</li> <li>➤ Terdapat Risiko Gratifikasi dan/atau penyyuapan dalam proses bisnis dalam pencapaian kinerja mengingat masih adanya interaksi langsung dengan pihak yang membutuhkan pelayanan (pemohon/ stakeholder lainnya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perlu diinisiasi (melalui kajian ilmiah, seminar, talk show, dan narasumber) terhadap peran AJIB dan CRO agar menjadi lebih optimal ketika seluruh layanan sudah online;</li> <li>➤ Dibuat sosialisasi terkait perubahan kebijakan baik dengan seminar, talk show, temu ilmiah, kajian, dan diskusi narasumber;</li> <li>➤ Pemetaan kebutuhan SDM dan penyusunan standarisasi kompetensi SDM sesuai kewenangan yang baru;</li> <li>➤ penempatan pegawai menyesuaikan kebutuhan dan standar kompetensi yang dibutuhkan;</li> <li>➤ Dibuatkan aturan dan atau kebijakan mengenai pelaksanaan tusi koordinasi pengawasan perijinan;</li> <li>➤ Menanamkan nilai-nilai atau budaya anti penyyuapan melalui Sertifikasi ISO 37001:1</li> </ul>
<b>Sekretariat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih belum tercukup sarana prasana di lingkup DPMPSTP</li> <li>➤ Belum seragamnya pemahaman SDM mengenai standarisasi administrasi keuangan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Inventarisasi dan koordinasi untuk pendataan ulang serta melakukan pengadaan sarana prasarana;</li> <li>➤ Pelatihan berkala terhadap peningkatan kapasitas staf administrasi keuangan;</li> <li>➤ Diklat, seminar, atau Coffee Morning yang membahas informasi dan perkembangan terbaru mengenai administrasi keuangan;</li> </ul>

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK;</li> <li>➤ Perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian masih perlu ditingkatkan;</li> <li>➤ Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan setiap unit tidak sama atau berbeda, jumlah SDM dan sarana teknis juga tidak sebanding dengan jumlah layanan yang dimohon;</li> <li>➤ Terdapat Risiko Gratifikasi dan/atau penyuapan dalam proses bisnis dalam pencapaian kinerja mengingat masih adanya interaksi langsung dengan pihak yang membutuhkan pelayanan (pemohon/ stakeholder lainnya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi dan kompetensi sesuai ANJAB dan ABK;</li> <li>➤ Dibuat kesepakatan dan kesepakatan bersama terhadap pentingnya perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian;</li> <li>➤ Pemetaan kebutuhan SDM setiap unit layanan serta panduan standarisasi kompetensi yang diperlukan untuk menunjang tupoksi setiap unit layanan;</li> <li>➤ Diklat diagendakan terjadwal dan harus mengacu pada peningkatan kompetensi untuk menunjang aktivitas unit layanan atau bidang;</li> <li>➤ Dilakukan rekrutmen PJLP guna memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai/mahasiswa magang;</li> <li>➤ Dilakukan rekrutmen pegawai kontrak atau penambahan formasi PNS kedepan sesuai kebutuhan;</li> <li>➤ Menanamkan nilai-nilai atau budaya anti penyuapan melalui Sertifikasi ISO 37001:1</li> </ul>
<p><b>Pusat Data dan Informasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan kemandirian DPMPSTSP dalam mengembangkan sistem pelayanan online</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mempercepat proses pengembangan untuk mendukung kemandirian melalui proses “<i>transfer knowledge</i>” keahlian pengembangan sistem dengan mendatangkan pakar atau ahli dibidangnya;</li> <li>➤ Mengakomodasi perubahan sebagai bagian dari penyesuaian era ekonomi digital dengan proses belajar, kajian independen, <i>lesson learned</i>, konsultasi ahli / narasumber, kunjungan lapangan, dan aktivitas pendukung lain;</li> </ul>

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Target sistem pelayanan online belum mencapai 100%;</li> <li>➤ Belum tersedianya SDM IT yang cukup di lingkungan DPMPTSP;</li> <li>➤ Terdapat Risiko Gratifikasi dan/atau penyuapan dalam proses bisnis dalam pencapaian kinerja mengingat masih adanya interaksi langsung dengan pihak yang membutuhkan pelayanan (pemohon/ stakeholder lainnya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diperlukan inovasi yang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital dengan beberapa penyesuaian terutama penggunaan layanan berbasis aplikasi untuk menunjang layanan capaian layanan 100% online;</li> <li>➤ Identifikasi dan pembuatan panduan teknis terkait standar kompetensi SDM di bidang ini;</li> <li>➤ Pengadaan kebutuhan SDM sesuai standar kompetensi teknis;</li> <li>➤ Menanamkan nilai-nilai atau budaya anti penyuapan melalui Sertifikasi ISO 37001:1</li> </ul>
<p><b>UPPMPTSP Kota/Kecamatan/Kelurahan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pesebaran sarana prasana yang standar belum merata</li> <li>➤ Pemenuhan SDM baik kuantitas maupun kualitas belum terpenuhi</li> <li>➤ Perubahan kebijakan yang membutuhkan respon cepat seringkali terlambat tersampaikan secara merata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Inventarisasi dan koordinasi untuk pendataan ulang serta melakukan pengadaan sarana prasarana;</li> <li>➤ Pengadaan Sarana Prasarana Sesuai Kebutuhan Unit</li> <li>➤ Pemetaan kebutuhan SDM dan penyusunan standarisasi kompetensi teknis SDM yang dapat menjadi panduan proses rekrutmen pegawai;</li> <li>➤ Rekrutmen pegawai menyesuaikan kebutuhan dan standar kompetensi teknis;</li> <li>➤ Dilakukan rekrutmen PJLP guna memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai/mahasiswa magang;</li> <li>➤ Diklat diagendakan terjadwal dan harus mengacu pada peningkatan kompetensi untuk menunjang aktivitas unit layanan</li> <li>➤ Sosialisasi peraturan, kebijakan, dan SOP terkait harus mempunyai agenda terjadwal dan bersifat segera serta dapat diinisiasi oleh bidang terkait</li> <li>➤ Pemanfaatan teknologi informasi dan penyiapan call center khusus untuk pelayanan internal kebijakan</li> </ul>

	<p>ke unit, sehingga seringkali terdapat perbedaan kebijakan layanan di masing-masing unit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penguatan fungsi Penanaman Modal di Unit Kota/Kecamatan dan Kelurahan belum sepenuhnya dipahami unit layanan</li> <li>➤ Terdapat Risiko Gratifikasi dan/atau penyuapan dalam proses bisnis dalam pencapaian kinerja mengingat masih adanya interaksi langsung dengan pihak yang membutuhkan pelayanan (pemohon/ stakeholder lainnya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diselenggarakan sosialisasi, bimtek, diklat terkait fungsi penanaman modal bagai unit terkait guna meningkatkan kompetensi;</li> <li>➤ Menanamkan nilai-nilai atau budaya anti penyuapan dan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan anti penyuapan</li> </ul>
--	---	--

Sumber : Hasil Wawancara, Diskusi, dan Dokumen Pendukung Diolah

### 2.3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Secara umum, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dinilai baik. Hal ini ditandai dengan realisasi penanaman modal melebihi dari target yang telah ditentukan, serta pelaksanaan sebagian besar program dan kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan. Beberapa program internal sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta. Kemajuan di bidang hukum dan perundang-undangan sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan diterbitkan beberapa peraturan yang mendukung kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, isu-sisu strategis yang menjadi fokus DMPTSP pada periode 2024 – 2026 mencakup:

1. Perbaikan iklim penanaman modal yang diharapkan mampu meningkatkan realisasi investasi di DKI Jakarta
2. Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan

### 2.4 Review terhadap RKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlibat dalam pencapaian target 8 prioritas Fokus Pembangunan DKI Jakarta 2024 pada :

1. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 6,2 %.
2. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas dan Kemudahan Layanan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,6

Dalam Isu dan Strategi Perencanaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlibat dalam Strategi Utama dalam mengatasi krisis Ekonomi yakni peningkatan kemudahan layanan perizinan berusaha melalui Pelaksanaan Reformasi



Tabel 2.3 Review Terhadap RKPD Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				802.614.484.122	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				739.343.078.531
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	610.130.766.796	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	555.526.212.896
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	156.800.045	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	156.798.042
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	156.800.045	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	156.798.042
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	562.738.511.620	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	512.565.647.024

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1317 Orang	562.721.149.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1243 Orang	512.548.284.404
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	17.362.620	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	17.362.620
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>5.162.236.983</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>5.113.807.812</b>
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	168.871.239	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	117.648.645
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.649.462.952	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.649.460.865
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	197.084.930	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	192.838.471

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	158.569.272	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	158.564.277
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	88.965.390	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	88.965.390
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Bahan/Material	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.353.307.500	Penyediaan Bahan/Material	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.347.664.464
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	168.291.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	168.291.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	279.150.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	291.840.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	98.534.700	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	98.534.700

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>23.328.474.600</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>17.238.720.246</b>
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengadaan Mebel	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	879.706.080	Pengadaan Mebel	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	997.641.138
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	500 Unit	16.233.607.596	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	500 Unit	13.096.271.508
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	6.189.190.753	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3.144.807.600
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	25.970.171	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>2.578.835.291</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>3.103.219.407</b>

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300 Unit	790.951.046	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	320 Unit	1.075.613.618
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	216.806.166	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	280.220.610
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.403.205	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	252.486.263
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.445.674.874	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.494.898.916
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>16.165.908.257</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>17.348.020.365</b>
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.488.650.550	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.878.505.235

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3.320.048.377	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3.320.048.377
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.419.338.240	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.462.974.560
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	6.937.871.090	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7.686.492.193
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Nilai kemudahan investasi</b>	<b>72,5 Nilai</b>	<b>1.060.970.898</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Nilai kemudahan investasi</b>	<b>75 Nilai</b>	<b>2.142.394.188</b>
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Persentase jumlah rancangan peraturan dan kebijakan penanaman modal yang disusun tepat waktu	100%	1.060.970.898	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Persentase jumlah rancangan peraturan dan kebijakan penanaman modal yang disusun tepat waktu	100%	2.142.394.188
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Dokumen	1.060.970.898	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Dokumen	2.142.394.188

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta, Luar daerah dan Luar Negeri	-Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	100%	9.459.522.857	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta, Luar daerah dan Luar Negeri	-Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	100%	9.723.543.435
			-Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	100%				-Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	100%	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan	16 Proyek	9.459.522.857	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan	22 Proyek	9.723.543.435
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	DKI Jakarta, Luar daerah dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	9.459.522.857	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	DKI Jakarta, Luar daerah dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	9.723.543.435
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	60%	2.972.537.177	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DKI Jakarta	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	75%	2.904.925.381

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	12000 Perusahaan	2.972.537.177	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	12250 Perusahaan	2.904.925.381
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	DKI Jakarta	-	-	-	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DKI Jakarta	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	23 Kegiatan Usaha	1.342.770.630
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	DKI Jakarta	-	-	-	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	465 Pelaku Usaha	438.110.890
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	DKI Jakarta	-	-	-	Pengawasan Penanaman Modall	DKI Jakarta	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	40 Kegiatan Usaha	1.124.043.861

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	16 Kegiatan Usaha	1.387.580.806	-	DKI Jakarta	-	-	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	23 Kegiatan Usaha	1.541.568.871	-	DKI Jakarta	-	-	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	422 Pelaku Usaha	43.387.500	-	DKI Jakarta	-	-	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	DKI Jakarta	<b>Persentase penerbitan izin tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>153.492.014.009</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	DKI Jakarta	<b>Persentase penerbitan izin tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>151.666.641.901</b>
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Laporan	153.492.014.009	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Laporan	151.666.641.901

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	11366 Pelaku Usaha	140.297.570.022	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	10.694 Pelaku Usaha	140.464.151.934
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	73536 Pelaku Usaha	13.194.443.987	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	68.536 Pelaku Usaha	11.202.489.967
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	DKI Jakarta	<b>Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan</b>	<b>87 Indeks</b>	<b>25.498.672.385</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	DKI Jakarta	<b>Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan</b>	<b>88 Indeks</b>	<b>17.379.360.730</b>
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Sistem yang Dikembangkan	3 Sistem	25.498.672.385	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Sistem yang Dikembangkan	3 Sistem	17.379.360.730

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	25.498.672.385	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	17.379.360.730
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>5.489.330.432</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>5.846.652.052</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DKI Jakarta	<b>Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>5.489.330.432</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DKI Jakarta	<b>Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>5.846.652.052</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	DKI Jakarta	<b>Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 indeks</b>	<b>3.884.961.180</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	DKI Jakarta	<b>Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 indeks</b>	<b>4.090.060.066</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	3.884.961.180	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.090.060.066
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	DKI Jakarta	<b>Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 indeks</b>	<b>540.028.359</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	DKI Jakarta	<b>Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 indeks</b>	<b>460.417.282</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	364 Unit	310.958.031	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	334 Unit	125.751.123

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	229.070.328	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59 Unit	216.713.119
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	-	DKI Jakarta	-	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	175 Unit	117.953.040
<b>UPPMPTSP KOTA - JAKPUS</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>4 indeks</b>	<b>1.062.820.893</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>4 indeks</b>	<b>1.095.116.997</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.874.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	125874000
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	26.406.900	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	26380493
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	881.988.573	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	881811084
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.551.420	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28551420
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	-	DKI Jakarta	-	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	32.500.000
<b>UPPMPTSP KOTA - JAKPUS</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>1.520.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>1.520.000</b>

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.520.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.520.000
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	-	DKI Jakarta	-	-	-	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	<b>199.537.707</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKPUS	-	DKI Jakarta	-	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 Unit	199.537.707
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	DKI Jakarta			<b>4.557.899.727</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	DKI Jakarta			<b>4.729.173.997</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	<b>4.557.899.727</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	<b>4.729.173.997</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	<b>1.098.900</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	<b>1.642.800</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.098.900	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.642.800
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	<b>1.291.088.043</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	<b>1.142.724.314</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	835.208.691	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	835.197.667

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	94.405.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	94.405.500
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	290.043.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	141.700.000
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	51.626.677	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	51.620.967
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	19.804.175	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	19.800.180
<b>UPPMPTSP KOTA - JAKUT</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>2.880.229.841</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>3.032.285.911</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	2.880.229.841	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.032.285.911
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	-	DKI Jakarta	-	-	-	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	DKI Jakarta	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>195.730.074</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	-	DKI Jakarta	-	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	195.730.074
<b>UPPMPTSP KOTA - JAKUT</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>385.482.943</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>356.790.898</b>

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	-	DKI Jakarta	-	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	47.124.000
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	295 Unit	143.135.278	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	437 Unit	95.239.200
UPPMPTSP KOTA - JAKUT	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	242.347.665	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	214.427.698
<b>UPPMPTSP KOTA - JAKBAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>6.636.505.012</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>7.103.800.836</b>
<b>UPPMPTSP KOTA - JAKBAR</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>6.636.505.012</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>7.103.800.836</b>
<b>UPPMPTSP KOTA - JAKBAR</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>2.010.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>2.005.200</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	2.010.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	2.005.200

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	1.313.348.747	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	1.343.288.115
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.110.554.923	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.110.541.403
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	105.679.415	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	112.064.934
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	41.832.540	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	38.068.560
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	32.856.869	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	23.513.218
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	22.425.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	59.100.000
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	-	DKI Jakarta	-	-	-	-	DKI Jakarta	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	199.480.487
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	-	DKI Jakarta	-	-	-	-	DKI Jakarta	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	199.480.487
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4.754.506.580	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4.936.279.390
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	4.750.906.580	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4.936.279.390

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	0
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	566.639.685	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	622.747.644
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300 Unit	304.206.443	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit	367.798.626
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	-	DKI Jakarta	-	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	58.230.600
UPPMPTSP KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	262.433.242	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	196.718.418
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.545.593.327	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				8.194.028.736
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	7.545.593.327	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	8.194.028.736
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	1.110.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	1.000.000

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	1.110.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.000.000
<b>UPPMPTSP KOTA - JAKSEL</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>1.742.591.809</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>1.741.229.650</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.457.678.784	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.447.249.303
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	209.999.790	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	209.999.790
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	27.777.750	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	51.625.000
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.124.688	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.344.760
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	26.010.797	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	26.010.797
<b>UPPMPTSP KOTA - JAKSEL</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>5.456.518.794</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>5.711.980.437</b>
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	5.456.518.794	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5.711.980.437

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	-	DKI Jakarta	-	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	197.659.032
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	-	DKI Jakarta	-	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	197.659.032
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	345.372.724	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	542.159.617
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	332 Unit	179.315.150	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	230.052.107
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	-	DKI Jakarta	-	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	134.065.800
UPPMPTSP KOTA - JAKSEL	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	166.057.574	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	178.041.710
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.583.741.094	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				8.111.140.520

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	7.583.741.094	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	8.111.140.520
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	1.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	1.500.000
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	1.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.500.000
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	1.746.423.705	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	1.757.435.063
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	190.908.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	190.908.900
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM					2.551.224	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	95.670.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	109.270.000
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.406.298.560	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.406.297.761
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.274.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.264.488
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.720.321	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.693.914

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	5.456.518.794	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	5.711.980.437
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	5.456.518.794	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5.711.980.437
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	-	DKI Jakarta	-	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks	199.722.300
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	-	DKI Jakarta	-	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	199.722.300
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	379.298.595	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	440.502.720
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	103.011.330	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	102.373.036
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	247.479.613	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	282.607.484

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
UPPMPTSP KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	78 Unit	28.807.652	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	55.522.200
<b>UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>2.169.452.130</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>2.392.925.392</b>
<b>UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>1.347.646.048</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>1.619.662.769</b>
<b>UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>2.000.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>2.000.000</b>
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	2.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	2.000.000
<b>UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>296.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>323.052.166</b>
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	199.999.212
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	51.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50.999.181

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	-	DKI Jakarta	-	-	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.389.873
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	-	DKI Jakarta	-	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	22.263.900
<b>UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU</b>	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	45.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	23.400.000
<b>UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>135.681.115</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>338.338.678</b>
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	-	DKI Jakarta	-	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	202.865.620
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	135.681.115	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	135.473.058
<b>UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>803.785.128</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>846.219.324</b>
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	803.785.128	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	846.219.324

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Rancangan Awal RKPD					RKPD 2024				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	110.179.805	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	110.052.601
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	-	DKI Jakarta	-	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI Jakarta	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150 Unit	21.414.750
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	110.179.805	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	88.637.851
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	DKI Jakarta	<b>Persentase penerbitan izin tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>821.806.082</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	DKI Jakarta	<b>Persentase penerbitan izin tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>773.262.623</b>
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		821.806.082	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		773.262.623
UPPMPTSP KABUPATEN - KEP. SERIBU	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	11366 Pelaku Usaha	821.806.082	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DKI Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	10000 Pelaku Usaha	773.262.623
<b>TOTAL</b>					<b>836.597.005.844</b>					<b>775.720.800.064</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi, lembaga penelitian, akademisi maupun dari perangkat daerah dari Provinsi hingga kabupaten/kota yang disampaikan secara langsung maupun melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat Provinsi.

Seluruh data aspirasi dan usulan masyarakat yang disampaikan melalui proses Musrenbang telah difasilitasi melalui sistem teknologi informasi yang dapat diakses melalui portal [musrenbang.jakarta.go.id](http://musrenbang.jakarta.go.id). Berdasarkan penarikan data pada sistem tersebut terdapat satu usulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	NIHIL	-	-

\*

# TUJUAN & SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

---

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan



### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

#### 3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

##### 3.1.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

RKP 2023 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu:

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
3. penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job;
4. mendorong pemulihan dunia usaha;
5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
8. pembangunan Ibu Kota Nusantara.

RKP 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,9 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen, Tingkat Kemiskinan 7,5–8,5 persen, Rasio Gini 0,375–0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31–73,49, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen, Nilai Tukar Petani 103–105, dan Nilai Tukar Nelayan 106–107. Perkembangan jumlah kasus Covid-19 di tanah air menunjukkan kecenderungan yang terus menurun dan terkendali. Berbagai indikator penting pembangunan juga terus menunjukkan perbaikan. Hal ini membangkitkan optimisme bagi kita semua untuk melakukan percepatan pemulihan dan tumbuh sehingga mampu menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja merujuk kepada Rencana Strategis Tahun 2023-2026, adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal untuk Mendukung Pembangunan Kota

Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal untuk Mendukung Pembangunan Kota diukur melalui Indikator **Realisasi Investasi**. Realisasi nilai investasi adalah nilai penanaman modal baik penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta. Nilai realisasi investasi diperoleh dari perhitungan jumlah nilai penanaman modal asing (PMA) ditambah penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta. Realisasi investasi adalah Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM.

Dalam rangka meningkatnya kualitas iklim penanaman modal untuk mendukung pembangunan kota maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan sasaran Perbaikan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing dengan indikator **Score of Business Enabling Environment**. Score of Business Enabling Environment adalah perhitungan mandiri tentang daya tarik investasi di DKI Jakarta dengan menggunakan beberapa indikator dalam kerangka regulasi, penyediaan layanan publik dan kombinasi keduanya sehingga akan memberikan nilai tambah dalam konteks data yang lebih luas dan analisis iklim penanaman modal.

Diukur melalui hasil survey kepada stakeholder terkait, yang dihitung dengan menggunakan beberapa indikator antara lain: kemudahan akses perizinan, lama waktu perizinan, kemudahan akses informasi investasi, kemudahan perpajakan, dukungan infrastruktur. Hasil diwujudkan dalam skala: Kurang Menarik : <51,0 Cukup Menarik : 51,1 - 61,0 Menarik : 61,1 - 80,0 Sangat Menarik : >80,1.

2. Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan

Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan diukur melalui **Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu**. Mengacu pada PermenPAN & RB No 14/2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara daring penuh melalui sistem perijinan. Pelaksanaan SKM dilakukan secara daring melalui sistem [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id) (kuesioner elektronik) setelah pemohon memperoleh izin/non izin dan bersifat non mandatory (tidak wajib mengisi).

Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi layanan yang dilaksanakan ooleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan melalui media daring sehingga dalam menyusun rangka pencapaian tujuan Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizina dirumuskan sasaran Pengembangan Layanan Berbasis Digital dan Aksesibilitas Perizinan dengan indikator **Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online**. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online adalah jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan. Izin yang Diterbitkan Secara Online adalah penerbitan izin yang menggunakan sistem perizinan dan nonperizinan.

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal untuk Mendukung Pembangunan Kota		Realisasi Nilai Investasi	*114 Triliun	*120 Triliun	*126 Triliun	*132 Triliun
		Perbaikan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing	Score of Business Enabling Environment	71.69	73.84	76.05	80.01
2	Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan		Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu	90.09	91	91	91
		Pengembangan Layanan Berbasis Digital dan Aksesibilitas Perizinan	Persentase Izin yang Diterbitkan Secara Online	100%	100%	100%	100%

\*Berdasarkan Target Kinerja pada Renstra

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Pada Renja 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan program yang terdapat di Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 yakni:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

---

Rincian Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikatif  
Perangkat Daerah Tahun 2024



Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				739.343.078.531	PAD			935.135.974.625
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	555.526.212.896	PAD		4 Indeks	684.428.377.320
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	DKI Jakarta	100%	156.798.042	PAD		100%	241.861.121
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKI Jakarta	4 Laporan	156.798.042	PAD		4 Laporan	141.861.121
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	512.565.647.024	PAD		4 Indeks	567.617.612.307

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	1,243 Orang/Bulan	512.548.284.404	PAD		1457 Orang/Bulan	567.584.341.060
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	4 Dokumen	17.362.620	PAD		7 Dokumen	33.271.247
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	5.113.807.812	PAD		4 Indeks	31.852.690.307
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	117.648.645	PAD		1 Paket	289.660.838
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	2.649.460.865	PAD		7 Paket	24.076.387.055
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	192.838.471	PAD		1 Paket	170.000.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	158.564.277	PAD		1 Paket	137.282.430

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	88.965.390	PAD		7 Paket	3.182.806.163
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	1.347.664.464	PAD		1 Paket	1.570.001.401
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	1 Laporan	168.291.000	PAD		7 Laporan	1.298.276.210
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	4 Laporan	291.840.000	PAD		14 Laporan	998.276.210
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta	1 Dokumen	98.534.700	PAD		1 Dokumen	130.000.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	17.238.720.246	PAD		4 Indeks	27.961.793.737
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	997.641.138	PAD		1 paket	3.316.000.000

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	500 Unit	13.096.271.508	PAD		500 Unit	20.256.496.864
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	DKI Jakarta	-	-	PAD		1 Unit	134.807.652
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Unit	3.144.807.600	PAD		4 Unit	3.307.249.479
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	-	-	PAD		80 Unit	947.239.742
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	17.348.020.365	PAD		4 Indeks	45.754.041.479
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKI Jakarta	4 Laporan	3.878.505.235	PAD		4 Laporan	4.487.039.675
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	3.320.048.377	PAD		4 Laporan	4.419.041.920

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	2.462.974.560	PAD		4 Laporan	3.091.406.155
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	7 Laporan	7.686.492.193	PAD		7 Laporan	33.756.553.729
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	3.103.219.407	PAD		4 Indeks	11.000.378.369
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	300 Unit	1.075.613.618	PAD		350 Unit	2.296.195.307
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	DKI Jakarta	-	-	PAD		30 Unit	352.827.352
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	180 Unit	280.220.610	PAD		180 Unit	1.718.459.045
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	1 Unit	252.486.263	PAD		1 Unit	3.291.953.853

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	1 Unit	1.494.898.916	PAD		1 Unit	3.307.249.479
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	DKI Jakarta	-		PAD		25 Unit	33.693.333
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai kemudahan investasi</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>75 Nilai</b>	<b>2.142.394.188</b>	<b>PAD</b>		<b>77.5 Nilai</b>	<b>1.949.400.788</b>
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase jumlah rancangan peraturan dan kebijakan penanaman modal yang disusun tepat waktu	DKI Jakarta	100%	2.142.394.188	PAD		100%	1.949.400.788
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DKI Jakarta	4 Dokumen	2.142.394.188	PAD		4 Dokumen	1.949.400.788
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	DKI Jakarta	100%	9.723.543.435	PAD		100%	10.424.578.064
			Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk		100%		PAD		100%	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			<b>BLUD, BUMD, dan Swasta</b>							
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan	DKI Jakarta	22 Proyek	9.723.543.435	PAD		28 Proyek	10.424.578.064
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	DKI Jakarta	4 Dokumen	9.723.543.435	PAD		4 Dokumen	10.424.578.064
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase penerbitan izin tepat waktu</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>100%</b>	<b>151.666.641.901</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>217.103.450.487</b>
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DKI Jakarta	2 Laporan	151.666.641.901	PAD		2 Laporan	217.103.450.487
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	10.694 Pelaku Usaha	140.464.151.934	PAD		10043 Pelaku Usaha	201.580.389.268

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	68.536 Orang	11.202.489.967	PAD		63536 Orang	15.523.061.219
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>75%</b>	<b>2.904.925.381</b>	<b>PAD</b>			<b>2.020.550.843</b>
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DKI Jakarta	12250 Perusahaan	2.904.925.381	PAD		12500 Perusahaan	2.020.550.843
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.05.1.01.05	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DKI Jakarta	23 Kegiatan Usaha	1.342.770.630	PAD			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.05.1.01.06	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DKI Jakarta	465 Pelaku Usaha	438.110.890	PAD			

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.05.1.01.04	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	DKI Jakarta	40 Kegiatan Usaha	1.124.043.861	PAD			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		DKI Jakarta	-	0	PAD		33 Kegiatan Usaha	825.768.754
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		DKI Jakarta	-	0	PAD		511 Pelaku Usaha	758.201.471
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		DKI Jakarta	-	0	PAD		36 Kegiatan Usaha	436.580.618
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>88 Indeks</b>	<b>17.379.360.730</b>	<b>PAD</b>		<b>89 Indeks</b>	<b>19.209.617.123</b>
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sistem yang Dikembangkan	DKI Jakarta	3 Sistem	17.379.360.730	PAD		3 Sistem	19.209.617.123

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DKI Jakarta	4 Dokumen	17.379.360.730	PAD		4 Dokumen	19.209.617.123
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		DKI Jakarta		5.846.652.052	PAD			5.731.640.638
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	5.846.652.052	PAD		4 Indeks	5.731.640.638
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	1.520.000	PAD		4 Indeks	1.672.000
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	1 dokumen	1.520.000	PAD		1 Dokumen	1.672.000
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	1.062.820.893	PAD		4 Indeks	1.169.102.982
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	881.811.084	PAD		1 Paket	970.187.430
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	125.874.000	PAD		1 Paket	138.461.400

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	28.551.420	PAD		1 Paket	31.406.562
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	1 Laporan	26.380.493	PAD		7 Laporan	29.047.590
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	4 Laporan	32.500.000	PAD		-	-
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	4.090.060.066	PAD		4 Indeks	4.046.834.638
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	12 Laporan	4.090.060.066	PAD		1 Laporan	4.046.834.638
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	460.417.282	PAD		4 Indeks	514.031.018
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	59 Unit	216.713.119	PAD		350 Unit	251.977.360
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	334 Unit	125.751.123	PAD		180 Unit	262.053.658

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	175 Unit	117.953.040	PAD		-	-
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	199.537.707	PAD		-	-
UP PMPTSP KOTA JAKARTA PUSAT	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	65 Unit	199.537.707	PAD		-	-
<b>UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA</b>	<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		<b>DKI Jakarta</b>		<b>4.729.173.997</b>	<b>PAD</b>			<b>4.862.107.239</b>
<b>UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA</b>	<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>4.729.173.997</b>	<b>PAD</b>		<b>4 Indeks</b>	<b>4.862.107.239</b>
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	1.642.800	PAD		4 Indeks	1.208.790
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	1 dokumen	1.642.800	PAD		1 Dokumen	1.208.790
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	1.142.724.314	PAD		4 Indeks	1.268.614.387

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	2 Paket	835.197.667	PAD		1 Paket	918.729.560
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	94.405.500	PAD		1 Paket	103.846.050
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	51.620.967	PAD		1 Paket	56.789.345
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	1 Laporan	19.800.180	PAD		1 Laporan	125.757.432
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	1 Laporan	141.700.000	PAD		2 Laporan	63.492.000
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	3.032.285.911	PAD		4 Indeks	3.168.252.824
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	3.032.285.911	PAD		1 Laporan	3.168.252.824
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	195.730.074	PAD		-	-
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	15 Unit	195.730.074	PAD		-	-

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	356.790.898	PAD		4 Indeks	424.031.238
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	25 Unit	47.124.000	PAD		-	-
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	30 Unit	214.427.698	PAD		350 Unit	266.582.432
UP PMPTSP KOTA JAKARTA UTARA	2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	437 Unit	95.239.200	PAD		180 Unit	157.448.806
<b>UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT</b>	<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		<b>DKI Jakarta</b>		<b>7.103.800.836</b>	<b>PAD</b>			<b>7.354.726.946</b>
<b>UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT</b>	<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>7.103.800.836</b>	<b>PAD</b>		<b>4 Indeks</b>	<b>7.354.726.946</b>
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	2.005.200	PAD		4 Indeks	2.210.000
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	DKI Jakarta	4 Dokumen	2.005.200	PAD		1 Dokumen	2.210.000

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	1.343.288.115	PAD		4 Indeks	1.499.616.055
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	3 Paket	1.110.541.403	PAD		7 Paket	1.221.610.415
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	112.064.934	PAD		1 Paket	116.247.356
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	38.068.560	PAD		7 Paket	98.661.018
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	3 Laporan	23.513.218	PAD		7 Laporan	38.429.766
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	4 Laporan	59.100.000	PAD		2 Laporan	24.667.500
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Indeks	199.480.487	PAD		-	-
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	15 Unit	199.480.487	PAD		-	-
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks		PAD		4 Indeks	5.229.597.238

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	-	PAD		4 Laporan	3.600.000
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	4.936.279.390	PAD		1 Laporan	5.225.997.238
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	367.798.626	PAD		4 Indeks	623.303.653
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	25 Unit	58.230.600	PAD		-	-
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	67 Unit	367.798.626	PAD		350 Unit	334.627.087
UP PMPTSP KOTA JAKARTA BARAT	2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	100 Unit	196.718.418	PAD		180 Unit	288.676.566
<b>UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN</b>	<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		<b>DKI Jakarta</b>		<b>8.194.028.736</b>	<b>PAD</b>			<b>7.664.861.277</b>

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	8.194.028.736	PAD		4 Indeks	7.664.861.277
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	1.000.000	PAD		4 Indeks	1.110.000
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	1 Dokumen	1.000.000	PAD		1 Dokumen	1.110.000
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	1.741.229.650	PAD		4 Indeks	1.964.801.986
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	2 Paket	1.447.249.303	PAD		1 Paket	1.603.446.662
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	209.999.790	PAD		1 Paket	230.999.769
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	6.344.760	PAD		1 Paket	48.713.995
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	1 Laporan	26.010.797	PAD		1 Laporan	49.895.560
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	4 Laporan	51.625.000	PAD		2 Laporan	31.746.000
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang	DKI Jakarta	4 Indeks	5.711.980.437	PAD		4 Indeks	5.425.549.614

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Urusan Pemerintahan Daerah							
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	5.711.980.437	PAD		1 Laporan	5.425.549.614
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	197.659.032	PAD		-	-
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	22 Unit	197.659.032	PAD		-	-
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	542.159.617	PAD		4 Indeks	273.399.677
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	20 Unit	134.065.800	PAD		-	-
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	31 Unit	178.041.710	PAD		-	166.057.574

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
UP PMPTSP KOTA JAKARTA SELATAN	2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	150 Unit	230.052.107	PAD		180 Unit	107.342.103
<b>UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR</b>	<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		<b>DKI Jakarta</b>		<b>8.111.140.520</b>	<b>PAD</b>			<b>8.245.596.994</b>
<b>UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR</b>	<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>8.111.140.520</b>	<b>PAD</b>		<b>4 Indeks</b>	<b>8.245.596.994</b>
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	1.500.000	PAD		4 Indeks	2.000.000
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	1 Dokumen	1.500.000	PAD		1 Dokumen	2.000.000
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	1.757.435.063	PAD		4 Indeks	2.383.031.644
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	2 Paket	1.406.297.761	PAD		1 Paket	2.118.922.401
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	0	PAD		1 Paket	2.551.224
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	190.908.900	PAD		1 Paket	143.076.780
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	25.264.488	PAD		1 Paket	41.438.886

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	1 Laporan	25.693.914	PAD		1 Laporan	28.292.353
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	1 Laporan	109.270.000	PAD		2 Laporan	48.750.000
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	5.711.980.437	PAD		4 Indeks	5.456.518.794
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	5.711.980.437	PAD		1 Laporan	5.456.518.794
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	199.722.300	PAD		-	-
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	25 Unit	199.722.300	PAD		-	-
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	440.502.720	PAD		4 Indeks	404.046.556
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	60 Unit	282.607.484	PAD		-	272.227.574

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Operasional atau Lapangan								
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	130 Unit	102.373.036	PAD		180 Unit	103.011.330
UP PMPTSP KOTA JAKARTA TIMUR	2.18.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	20 Unit	55.522.200	PAD		25 Unit	28.807.652
<b>UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU</b>	<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		<b>DKI Jakarta</b>		<b>2.392.925.392</b>	<b>PAD</b>			<b>2.108.666.902</b>
<b>UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU</b>	<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>4 Indeks</b>	<b>1.619.662.769</b>	<b>PAD</b>		<b>4 Indeks</b>	<b>1.286.860.820</b>
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	4 Indeks	2.000.000	PAD		4 Indeks	2.500.000
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKI Jakarta	4 Dokumen	2.000.000	PAD		7 Dokumen	2.500.000
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	4 Indeks	323.052.166	PAD		4 Indeks	281.269.800
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Paket	199.999.212	PAD		1 Paket	190.000.000

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Paket	50.999.181	PAD		1 Paket	50.000.000
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	1 Paket	26.389.873	PAD		-	-
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	1 Lporan	22.263.900	PAD		-	-
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI Jakarta	4 Laporan	23.400.000	PAD		1 Laporan	41.269.800
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	338.338.678	PAD		4 Indeks	131.751.095
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Unit	135.473.058	PAD		1 Unit	131.751.095
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	15 Unit	202.865.620	PAD		-	-
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	846.219.324	PAD		4 Indeks	761.160.120
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	4 Laporan	846.219.324	PAD		1 Laporan	761.160.120

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Indeks	110.052.601	PAD		4 Indeks	110.179.805
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	150 Unit	21.414.750	PAD		-	-
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKI Jakarta	4 Unit	88.637.851	PAD		180 Unit	110.179.805
<b>UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU</b>	<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase penerbitan izin tepat waktu</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>100%</b>	<b>773.262.623</b>	<b>PAD</b>			<b>821.806.082</b>
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DKI Jakarta	4 Laporan	773.262.623	PAD		2 Laporan	821.806.082
UP PMPTSP KAB KEPULAUAN SERIBU	2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	DKI Jakarta	10000 Pelaku Usaha	773.262.623	PAD		10043 Pelaku Usaha	821.806.082

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>TOTAL</b>						<b>775.720.800.064</b>			<b>971.103.574.621</b>	

---

**PENUTUP**



Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2023-2026. Fungsi Dokumen Renja Tahun 2024 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2024.

Diharapkan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi di DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk percepatan pencapaian Sasaran menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPD 2023-2026 dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Jakarta, 21 Juli 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Benni Aguscandra  
NIP. 196908081997031004